



GOVERNANCE INSTITUTIONS

A. DEFINISI GOVERNANCE INSTITUTIONS

Perspektif baru tentang bagaimana pemerintah menjalankan sistem disebut *governance*. Menurut Budiati (2012), sudut pandang ini muncul sebagai akibat dari persepsi bahwa peran yang dimainkan oleh pemerintah terlalu besar dan kuat, mencegah individu untuk berkembang secara bebas. Akibatnya, tata kelola kini tidak hanya mencakup pemerintah tetapi juga masyarakat dan sektor swasta pada khususnya. Hal ini karena paradigma pembangunan telah berubah, dan alih-alih bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, pemerintah kini melihat bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif dan berinvestasi dalam infrastruktur yang mengoptimalkan bisnis. Oleh karena itu, tata kelola adalah hubungan yang terkoordinasi dan sinergis antara masyarakat, khususnya dunia usaha dan swasta, dan pemerintah untuk mengoptimalkan proses pembangunan yang memberdayakan sumber daya dan membangun institusi yang sehat untuk mengoptimalkan sistem produksi yang efektif.

Kualitas institusi telah lama diakui sebagai komponen penting dari pasar yang berfungsi dengan baik. Aktivitas pasar melibatkan interaksi manusia, dan institusi ada untuk meminimalisir ketidakpastian yang muncul dari informasi yang tidak lengkap mengenai perilaku individu lain dalam proses interaksi manusia ini. Lembaga dapat bertindak melalui sejumlah saluran:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memuntakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

1. Mereka meminimalisir asimetri informasi karena mereka menyalurkan informasi tentang kondisi pasar, barang dan peserta
2. Mereka meminimalisir risiko saat mereka mendefinisikan dan menegakkan hak dan kontrak properti, menentukan siapa mendapatkan apa dan kapan
3. Mereka membatasi tindakan politisi dan kelompok kepentingan, membuat mereka bertanggung jawab kepada warga negara.

Segala penelitian telah menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, Adam (1776) mencatat bahwa kontrak swasta (kelembagaan) kualitas) adalah prasyarat penting untuk pertukaran yang saling menguntungkan yang mendorong spesialisasi, inovasi, dan pertumbuhan-faktor utama yang mengarah pada keuntungan dari perdagangan.

Studi empiris yang lebih baru telah mengungkapkan bahwa kualitas kelembagaan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi investasi publik dan swasta yang lebih tinggi, peningkatan stok sumber daya manusia (Arimah, 2004), pengelolaan konflik etnis yang lebih baik, berkurangnya ketimpangan pendapatan (Gradstein, 2004). pengembangan keuangan yang lebih baik, alokasi bantuan yang lebih efisien, dan sseberlanjutan yang lebih besar dari “kumpulan sumber daya bersama” melalui kerjasama manusia.



Institutional theory adalah salah satu teori yang banyak dipakai untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacin et al., 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang diembagikan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Dalam peningkatan kualitas dan memaksimalkan potensi, institutional theory terbagi dalam 2 kelompok pandangan yaitu old-institutional theory (OIT) dan new institutional theory (NIT). OIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena adanya nilai (values), norma (norms) dan perilaku (attitudes) yang bersifat taken-for-granted, sedangkan NIT berpendapat bahwa institutionalization terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan classifications, routines, scripts, schema (Greenwood & Meyer, 2008)

Pendekatan OIT tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena berpandangan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi faktor-faktor yang sudah given, sedangkan pada kenyataannya, dinamika organisasi semakin kompleks (DiMaggio & Powell, 1983) dan actors mempunyai pemikiran logis yang dapat menjadi awal dari perubahan dalam organisasi (Reay & Hinings, 2009). Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan pendekatan NIT berupa konsep isomorphism yang dikembangkan oleh DiMaggio & Powell (1983) dan institutional logics yang dikembangkan oleh Friedland & Alford (1991), Thornton, Ocasio, & Lounsbury (2012) dan Zilber (2013).

Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, para aktor yang dalam hal ini adalah para



penyusunan laporan tahunan di lingkungan K/L sebenarnya berada dalam satu lingkungan peraturan yang sama. Namun praktik penyusunan dan publikasi laporan tahunan ini kemudian menjadi berbeda karena masing-masing aktor mempunyai logika yang berbeda yang dipengaruhi oleh classifications, routines, scripts, schema di lingkungan K/L masing-masing. Selain itu, perbedaan logika aktor mungkin dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari luar seperti tekanan politik dari lembaga tertentu, keputusan yang diambil oleh aktor lain dan tuntutan profesionalisme dari stakeholder.

Selain itu Teori Institusional (Institusional Theory) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (legitimate) serta layak untuk didukung . Teori Institusional yang dikemukakan oleh Scott menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik (Scott, 2008).

Teori Institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan mempunyai kecenderungan



untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada (Fitrianto, 2020). Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan harapan sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan mempunyai kesamaan atau isomorfisme (isomorphism) dengan organisasi publik lainnya. Perspektif yang dikemukakan oleh Ridha dan Basuki (2012) menjelaskan bahwa muncul bentukan-bentukan dari Institutional yang bersifat isomorphism.

Oleh sebab itu, DiMaggio dan Powell (1983) memperkenalkan isomorphic change yaitu perubahan organisasi menuju kearah yang sama (homogenization) karena adanya pengaruh dari luar. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi terdapat 3 mekanisme terjadinya isomorphic change yaitu coercive isomorphism, normative isomorphism, dan mimetic isomorphism. Coercive isomorphism ditimbulkan karena adanya pengaruh politik dan permasalahan legitimasi dari luar organisasi (P. J. DiMaggio & Powell, 2000)). *Coercive isomorphism* dapat datang dari organisasi yang berperan sebagai regulator . Sebagai organisasi yang bergerak pada sektor publik, aktor yang bertugas untuk menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan tentunya tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga regulator. Oleh sebab itu, coercive isomorphism sangat mungkin terjadi pada proses penyusunan dan publikasi laporan tahunan. Normative isomorphism suatu mekanisme



perubahan dalam organisasi yang dipicu adanya dorongan profesionalisme (Greenwood & Meyer, 2008).

Lebih lanjut, DiMaggio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa dorongan profesionalisme ini dapat berasal dari tuntutan stakeholder maupun dari kesepakatan organisasi profesi. Organisasi sektor publik seperti K/L tentu mempunyai banyak sekali stakeholder. Dengan semakin berkembangnya dinamika sosial, sangat mungkin K/L dihadapkan pada tuntutan dari stakeholder agar semakin profesional dalam berkinerja. Kondisi eksisting tersebut secara logis juga sangat mungkin terjadi dalam proses penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik. Mimetic isomorphism adalah suatu perubahan organisasi karena adanya ketidakpastian dalam konteks tertentu. Saat menghadapi ketidakpastian atau tidak ada suatu standard yang jelas yang harus dijalankan, organisasi akan cenderung melihat organisasi lainnya (melakukan benchmarking) dan akan meniru organisasi lain dalam suatu aspek yang dianggap baik apabila diterapkan di organisasi (P. DiMaggio & Powell, 1983). Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan, mimetic isomorphism mungkin terjadi karena hingga saat ini belum terdapat suatu peraturan khusus yang mewajibkan K/L untuk menyusun laporan tahunan termasuk standard yang harus dipedomani dalam penyusunannya.

Perspektif Institutional Logics dalam tata kelola adalah sebuah kerangka metateoritis yang mempelajari hubungan timbal balik antara lembaga, individu dan organisasi dalam tatanan sosial (Friedland, 2012) Institutional logics mempelajari konstruksi sosial,



pola historis dari praktik-praktik material, asumsi, nilai-nilai, kepercayaan, dan aturan-aturan yang digunakan oleh individu dalam menghasilkan nafkah hidup, mengatur ruang dan waktu, dan menginisiasi makna pada realitas sosial mereka. Institutional logics juga mewakili kerangka referensi yang mempengaruhi aktor untuk membuat pilihan yang logis, merumuskan kata untuk memotivasi tindakan, perasaan diri dan identitas mereka (Friedland, 2012). Institutional logics adalah pendekatan yang tepat untuk mendapatkan pandangan yang holistik dan koheren mengenai bagaimana organisasi disusun dan dikelola (Greenwood et al., 2014)

Terdapat 4 prinsip utama dalam perspektif institutional logics, yaitu: (1) terintegrasinya lembaga dan struktur; (2) terintegrasinya materi dengan simbolik; (3) memperhatikan kontinjensi historis dari lembaga; dan (4) memperhatikan institusi seluruh tingkatan sosial (Zilber, 2013). Prinsip yang paling utama dalam institutional logics adalah terintergrasinya aspek material (material aspects) dan aspek simbolik (symbolic aspects) dan ini adalah prinsip yang membedakan NIT dengan OIT. Symbolic aspects merujuk pada proses ideasi dan makna, sedangkan material aspects merujuk pada struktur dan praktik dalam organisasi. Symbolic carriers terdiri dari aturan, norma, dan sistem kepercayaan yang tertanam dalam institutional logics (Lepoutre & Valente, 2012). Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, symbolic carriers dapat terdiri dari peraturan atau pedoman yang berlaku secara internasional maupun nasional.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Di tingkat internasional terdapat beberapa pedoman yang mungkin dapat mempengaruhi logika dari actors, yaitu:

- a. Publikasi Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada tahun 2002 yang berjudul Public Sector Transparency and Accountability menjelaskan bahwa salah satu area utama dalam good governance adalah meningkatkan keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah untuk aktif menyediakan informasi adalah laporan tahunan yang memuat informasi keuangan dan non-keuangan seperti perbandingan antara target dan capaian kinerja (Oecd, 2002)
- b. International Framework: Good Governance in The Public Sector yang dirumuskan oleh Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) dan International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2014. Sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik, pemerintah harus menyusun laporan tahunan. Laporan tahunan harus dilengkapi dengan informasi kinerja dan informasi tentang penilaian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik termasuk rencana aksi untuk perbaikan tata kelola dimaksud (IFAC & CIPFA, 2014). Selain itu, Laporan tahunan juga harus dilengkapi informasi tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal (Pilcher, 2018)

- c. Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan oleh negara maju seperti Australia dan United Kingdom (UK). Pemerintah Australia mewajibkan setiap lembaga publik untuk menyusun laporan tahunan melalui Financial Accountability Act yang disahkan pada tahun 2009. Peraturan tersebut kemudian dilengkapi dengan beberapa pedoman teknis diantaranya Model Annual Reports yang dikeluarkan oleh Departemen of Treasury, Annual Report Checklist yang dikeluarkan oleh Public Sector Commission (PSC) serta Good Practice in Annual yang dikeluarkan oleh National Audit Office (NAO).

Sedangkan di UK, HM Treasury mengeluarkan The Government Financial Reporting Manual (GFRem) untuk setiap tahun anggaran. Di tingkat nasional, terdapat beberapa pedoman atau peraturan yang mungkin dapat menjadi pertimbangan dari aktor dalam mengambil keputusan untuk menyusun atau tidak menyusun dan mempublikasikan atau tidak mempublikasikan laporan tahunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pedoman Good Public Governance yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Material carriers terdiri dari 3 hal yaitu relational systems, routines dan artifacts (SCOTT, 2014). Relational systems adalah interaksi dan hubungan antar aktor baik dalam satu organisasi maupun lintas organisasi. Relational systems adalah aspek yang paling banyak menimbulkan difusi atau persebaran budaya, teknologi atau ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Relational systems akan semakin kuat ketika terbentuk community of practices atau suatu wadah yang memungkinkan terjadinya diskusi dan pertukaran ide antar aktor. Dalam kaitannya dengan penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, relational systems dapat terjadi di lingkup internal suatu K/L yakni antar individu, bidang/bagian, dan eselon. Selain itu, relational systems juga dapat terbentuk dari interaksi aktor (PPID) antar K/L.

Logika aktor juga dapat dipengaruhi oleh routines yang terbentuk dalam organisasi. Routines adalah kebiasaan yang menjadi



budaya organisasi atau aktivitas-aktivitas yang berpola yang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman (tacit knowledge) dari aktor. Dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, routines dapat merujuk pada standard operating procedures (SOP) dan budaya organisasi yang mempengaruhi logika aktor dalam mengambil keputusan. Material carriers yang ketiga adalah artifacts yang merujuk pada budaya material yang diciptakan oleh kecerdasan manusia yang dikembangkan untuk membantu pelaksanaan tugas (Scott, 2009). Dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik, artifacts dapat berupa sistem informasi, dukungan teknologi, kegiatan asistensi dan dukungan teknis lainnya.

B. PENERAPAN GOVERNANCE INSTITUTIONS

Penerapan tata kelola kelembagaan Disarankan menggunakan seperti tata kelola perusahaan yang baik (GCG) sebagai titik awal dalam menjalankan suatu tujuan. Menurut (Karyono, 2013), GCG berpegang pada prinsip kode etik dan prinsip-prinsip untuk mencapai harapan dan, meskipun faktanya itu membahas kontrol, tidak diskriminatif, mempunyai penonton muda, dan mempunyai kontrol media atas masa.

Menurut Brown (2014), faktor terpenting dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaporan keuangan adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang baik, yang digunakan organisasi untuk meminimalisir jumlah kesalahan atau manipulasi dalam sistem akuntansi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan Operasional (Almasarwah, 2015). Melalui penerapan



sistem informasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta meminimalisir jumlah kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan penyajian laporan keuangan.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam bisnis. Dengan kata lain, dunia bisnis juga harus membangun dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Tulisan ini hanya akan fokus pada industri perbankan dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Faktor utama yang berkontribusi Pemilihan industri atau institusi perbankan adalah sebagai berikut: pertama, bahwa perbankan mempunyai peran yang sangat strategis berdasarkan pilar-pilar pembangunan ekonomi bangsa, sangat mempengaruhi dinamika perekonomian. Tentunya, tanpa bermaksud untuk mengabaikan atau merendahkan peran yang dimainkan oleh lembaga keuangan dan ekonomi lainnya. Kedua, perbankan adalah lembaga keuangan yang paling mendapat perhatian sehubungan dengan krisis multifaset yang melanda bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini. Perhatian khusus diberikan pada aspek manajemen bank. (Raffles, 2011).

Kebijakan pembangunan ekonomi bangsa sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, lembaga keuangan selalu berperan aktif dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian bangsa akan dapat tumbuh jika lembaga keuangan berkembang secara sehat dan positif. Di sisi lain, ketika lembaga keuangan suatu negara mengalami krisis, dapat diartikan sebagai kontraksi dalam perekonomian.

Dengan meningkatkan eskalasi peredaran dana yang mereka kumpulkan, bank dan lembaga perbankan lainnya berperan dalam

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menggerakkan perekonomian sebagai bentuk lembaga keuangan.

Bank adalah jenis usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat melalui tabungan dan kemudian menginisiasi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis kegiatan perbankan yang pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat umum, yang disebut sebagai kegiatan pendanaan dalam industri perbankan.

Sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, industri perbankan menempati posisi yang strategis. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian nasional, serta adalah faktor yang sangat penting dalam proses penyesuaian diri terhadap tantangan yang semakin cepat dan kompleks. perekonomian nasional. Dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional, koperasi perlu meningkatkan peran perbankan nasional dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan sektor ekonomi nasional dan mengutamakan usaha kecil dan menengah. pengusaha serta segala lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah merintis perbaikan tata kelola pemerintahan sejak tahun 2008, di mana saat itu terjadi krisis moneter dan masyarakat menuntut adanya reformasi sistem demokrasi dan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Saputra et al., 2017). Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai salah satu implementasi Letter of Intent IMF (KNKG, 2019). KNKG berhasil menyusun Pedoman Umum Good

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Corporate Governance (GCG) Indonesia pada tahun 1999 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2006. Pedoman Umum GCG diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan GCG perusahaan khususnya terkait interaksi di antara Direksi, komisaris, internal perusahaan, pemegang saham, dan stakeholder lainnya (KNKG, 2006).

Sejak diterbitkannya Pedoman Umum GCG tersebut, good corporate governance di dunia usaha dirasakan mengalami peningkatan. Namun hal ini belum cukup, karena perbaikan good governance di sektor publik juga sangat penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2008, KNKG menerbitkan Pedoman Umum Good Public Governance (GPG) Indonesia atau yang lebih lanjut disebut dengan Pedoman Umum GPG Indonesia. Pedoman Umum GPG Indonesia memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan yang berlaku bagi semua lembaga negara baik di ranah eksekutif, yudikatif, legislatif dan pengawasan maupun lembaga non- struktural. Pedoman ini menyarankan setiap lembaga negara untuk menyusun panduan yang lebih operasional sesuai dengan stuktur dan proses bisnis masing-masing.

Setiap lembaga negara harus melakukan internalisasi pelaksanaan GPG dengan harapan pelaksanaan GPG bukan hanya di atas kertas saja namun menjadi bagian budaya yang melekat dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, setiap lembaga negara juga dianjurkan untuk melakukan penilaian penerapan GPG secara berkesinambungan dan mengungkapkan hasil penilaian penerapan GPG tersebut dalam laporan tahunan yang dapat diakses oleh



masyarakat luas (Susilawati, 2015). Baik di sektor privat maupun sektor publik, laporan tahunan dianggap sebagai sarana yang baik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada stakeholder dan mewujudkan akuntabilitas (Ryan et al., 2002). Pada sektor privat di Indonesia, emiten dan perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada stakeholder. Laporan Tahunan wajib memuat beberapa informasi penting, diantaranya: ikhtisar data keuangan penting, informasi saham, laporan Direksi, laporan Dewan Komisaris, laporan keuangan yang disusun sesuai Standard Akuntansi Keuangan (SAK) yang sudah diaudit dan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.

Kondisi eksisting sedikitnya K/L yang menyusun laporan tahunan ini, menunjukkan adanya keengganan dari K/L untuk menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan. Keengganan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak masyarakat terhadap ketersediaan akses informasi penting tentang K/L, diantaranya informasi tentang proses bisnis/tata kelola, pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, dampak dan nilai dari program dan kegiatan, pandangan ke depan terkait situasi global dan nasional, dan langkah antisipatif dalam menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Lebih lanjut, keengganan ini menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat yang kemudian menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2018 yang dirilis oleh BPS masih berada dalam kategori “buruk”.



Kondisi eksisting dan faktor-faktor yang menjadi penyebab keengganan Kementerian/Lembaga Negara dalam menyusun dan mempublikasikan laporan tahunan yang bersifat non-mandatory dan berisi tentang informasi non-finansial, dapat digali lebih dalam melalui penelitian yang berlandaskan *institutional theory*. *Institutional theory* adalah teori yang menjelaskan kondisi eksisting kecenderungan perubahan dalam organisasi menuju kesamaan (*homogeneous*) (P. J. DiMaggio & Powell, 1983). *Institutional theory* terbagi ke dalam dua kelompok yaitu *old institutional theory* (OIT) dan *new institutional theory* (NIT). OIT memandang *institutionalization* terjadi karena adanya nilai (*values*), norma (*norms*) dan perilaku (*attitudes*) yang bersifat *taken-for-granted*, sedangkan NIT memandang *institutionalization* terjadi karena organisasi berfikir secara logis dengan mempertimbangkan *classifications, routines, scripts, dan schema* (Powell & DiMaggio, 1991). Ryan dan Ng (2000) menemukan fakta bahwa di Queensland, disclosure GPG untuk prinsip monitoring mendapat perhatian paling banyak dari badan publik karena mekanisme *internal control* telah diatur secara jelas oleh *Queensland Treasury* dan diawasi oleh ANAO.

Sedangkan prinsip akuntabilitas mendapatkan perhatian yang paling sedikit karena sifatnya yang kompleks dan berpotensi menjadi “alat” bagi parlemen untuk mengkritisi pemerintah apabila diungkapkan. Meskipun tidak menggunakan *institutional theory*, temuan ini menjelaskan adanya *coercive isomorphism* atau pertimbangan logis atas adanya suatu tekanan politis dalam disclosure laporan tahunan. Ryan, Dunstan, dan Brown (2002)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



menemukan fakta bahwa lembaga publik akan menyesuaikan tingkat disclosure laporan tahunan mereka dengan faktor tekanan dari luar yaitu kebutuhan dan permintaan dari stakeholder. Kondisi eksisting ini menjelaskan adanya normative isomorphism dalam penyusunan laporan tahunan. Ntim, Soobaroyen, dan Broad (2017) menemukan fakta bahwa voluntary disclosures pada laporan tahunan Lembaga Pendidikan Tinggi di UK masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari komite audit, variasi latar belakang governing board, dependensi governor dan keberadaan komite tata kelola. Meskipun tidak menggunakan institutional theory dalam penelitiannya, temuan tersebut menjelaskan adanya pengaruh dari dua faktor material carriers yaitu actors, dan rules (Ntim et al., 2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.